

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi dan Qatar merupakan kedua negara yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai negara yang bertentangan keduanya tentu memiliki hubungan yang kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bukti kuat akan hubungan baik mereka adalah keikutsertaan kedua negara dalam GCC (*Gulf Cooperation Council*), sebuah organisasi yang dibentuk pada 1981 dimana anggotanya berasal dari negara-negara Teluk. Hubungan antara keduanya sangat baik pada tahun 1970-an, pada masa itu keduanya ibarat saudara yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, dimana Arab Saudi selalu membantu Qatar dalam menjalankan pemerintahannya yang saat itu dipimpin oleh Khalifa bin Hamad Al Thani, bahkan Arab Saudi sempat menjadi pelindung bagi pemerintahan Qatar secara *de Facto*. Namun, hubungan antar keduanya berubah drastis setelah Khalifa bin Hamad Al Thani yang menjabat sebagai emir dari tahun 1972-1995 menyerahkan kekuasaannya pada anak pertamanya yang juga merupakan putra mahkota dari Kerajaan Qatar yang bernama pangeran Hamad bin Khalifa Al-Thani pada tahun 1992. Pangeran ini memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya terkait masa depan Qatar yang cenderung bertentangan dengan Arab Saudi (Cherkaoui, 2014). Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa

Hamad bin Khalifa Al-Thani telah melengserkan kekuasaan ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani yang saat itu tengah berlibur di Jenewa pada tahun 1995 (Prastiwi, 2017).

Ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar sudah berlangsung sejak pertengahan abad 20, saat itu perseteruan antara kedua negara terpusat pada sengketa perbatasan yang melibatkan beberapa negara Teluk lainnya, seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab. Sejak saat itu, sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar terus berlangsung hingga kedua belah pihak menyepakati batas final mereka pada perundingan tahun 2008. Salah satu sengketa batas wilayah kedua negara yang juga melibatkan Uni Emirat Arab adalah sengketa atas wilayah Khawr al-Udayd. Wilayah ini dianggap strategis oleh Inggris untuk meneguhkan dominasinya di wilayah Teluk pasca kekuasaan Turki Usmani. Konflik antara keduanya semakin memanas setelah ditemukannya kandungan minyak dan gas di wilayah tersebut. Adapun keterkaitan antara sengketa wilayah Khawr al-Udayd yang diperebutkan oleh Arab Saudi dan Qatar dengan kandungan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dilihat dari proyek pembangunan pipa minyak Dolphin yang melibatkan Qatar dan Abu Dhabi (UEA) serta pembangunan *Causeway* yang menghubungkan Qatar dengan Abu Dhabi yang melewati wilayah Khawr al-Udayd pada tahun 2006, dimana hal itu menuai kecaman serta protes keras dari Arab Saudi (Wardoyo, 2018).

Seiring berjalannya waktu, isu ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar juga mengalami perubahan faktor. Jika sebelumnya isu konflik antar kedua negara dipicu oleh faktor sengketa perbatasan wilayah dan sumber daya alam, saat ini konflik antar keduanya lebih menjurus pada faktor *policy* atau kebijakan, lebih tepatnya kebijakan luar negeri Qatar yang sangat bertentangan dengan Arab Saudi. Salah satunya adalah penerimaan terhadap *Ikhwanul Muslimin* di negara tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keberpihakan Qatar terhadap *Ikhwanul Muslimin* adalah hal yang nyata dilakukan oleh Qatar. Dapat dilihat bagaimana tokoh-tokoh *Ikhwanul Muslimin* dapat hidup dengan tenang di Qatar, salah satunya adalah Yusuf Qordhowi, seorang anggota *Ikhwanul Muslimin* yang berasal dari Mesir yang saat ini sudah memperoleh kewarganegaraan Qatar. Beliau merupakan seorang ulama Qatar sekaligus pendiri fakultas *Syari'ah* di *Qatar University* pada tahun 1961 dan sampai saat ini masih eksis, pada tahun 2008-2009, beliau hanya mengajar 257 mahasiswa yang kebanyakan berasal dari luar Qatar (Roberts, 2014).

Selain keberpihakan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, Qatar juga terlibat dalam peristiwa *Arab Springs*, dimana negara ini mendukung penuh gerakan revolusi yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, khususnya di Libya dan Suriah (Cahyani, 2019). Dalam rangka merespon kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang dianggap telah melampaui batas tersebut, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (*Gulf Cooperation*

Council) sepakat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar (Cahyani, 2019, hal. 518).

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Arab Saudi terus berupaya untuk menekan Qatar dengan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang menyudutkan Qatar. Salah satu kebijakan luar negeri Arab Saudi yang diduga cukup merugikan Qatar adalah blokade. Kebijakan Arab Saudi ini kemudian diikuti oleh negara-negara tetangganya yang juga merupakan bagian dari *Quartet* atau anti-Qatar yang terdiri dari; Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Adapun bentuk dari kebijakan blokade Qatar tersebut adalah larangan bagi warga Qatar untuk menggunakan serta melintasi jalur darat, laut, serta udara dari dan ke sejumlah negara-negara tetangga, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, dan tentunya Arab Saudi. Tidak hanya lima negara itu saja yang melakukan blokade terhadap Qatar, Mauritius, Mauritania, Maladewa, dan Libya juga memberlakukan hal serupa terhadap negara tersebut. Kebijakan blokade ini tidak hanya berlaku di Qatar, blokade ini juga berimbas pada warga Qatar yang berada di luar negeri, seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, dimana mereka diminta untuk meninggalkan negara-negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Tidak berhenti sampai disitu, ketiga negara tersebut bahkan melarang warga negara mereka untuk

pergi ke Qatar (Widodo, 2019). Menanggapi kebijakan Arab Saudi yang melakukan blokade terhadap negaranya, pemerintah Qatar tentunya tidak tinggal diam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi dan beberapa negara tetangga Teluk lainnya terhadap Qatar telah membuat negara tersebut merugi senilai miliaran dolar AS. Oleh karena itu, pemerintah Qatar dikabarkan telah mengupayakan kompensasi atas kerugian yang dipicu oleh kebijakan blokade Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap dirinya (Ferida, 2017). Tidak hanya Qatar, negara-negara kuat di dunia internasional seperti Amerika Serikat, China, hingga negara-negara di Eropa juga turut merespon kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut, mereka menyerukan kepada negara-negara anggota GCC agar krisis diplomatik Qatar segera diselesaikan melalui dialog yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun faktanya belum ada diantara negara-negara tersebut yang mau mengambil tindakan khusus untuk mewujudkan agar dialog ini dapat terealisasi. Hal ini diduga kuat karena mereka (negara-negara Barat) tersebut juga terlibat dalam persaingan bisnis Teluk bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan dua hegemon di Timur Tengah (Kinninmont, 2019). Besarnya pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah menjadi alasan bagi penulis untuk mencoba meneliti lebih dalam terkait kebijakan blokade yang diterapkannya terhadap Qatar. Lebih tepatnya, penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi

mengeluarkan kebijakan blokade tersebut dengan menggunakan lensa teoritis yaitu perspektif *Decision Making* yang mampu meninjau faktor-faktor penyebab diberlakukannya kebijakan tersebut oleh Arab Saudi berdasarkan keadaan yang ada pada *unsur* domestik dan internasionalnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ingin dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar jika ditinjau dari Perspektif *Decision Making*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan Arab Saudi terkait Blokade Qatar ditinjau dari Perspektif *Decision Making* atau lebih tepatnya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan blokade tersebut terhadap negara Qatar secara komprehensif.

1.4 Signifikansi Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki hegemoni terbesar di kawasan Timur Tengah, dan Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dengan cadangan LNG (*Liquefied natural gas*) yang mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia, selain itu penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan perkapita rata-rata negara ini mencapai US\$ 100.000 per-tahun, jumlah ini jauh melampaui Amerika Serikat dan Inggris (Susilo, 2017). Tidak hanya itu, negara ini juga menghabiskan lebih dari \$120 miliar untuk infrastruktur LNG yang dimilikinya (Ulrichsen, 2014). Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian di kawasan Timur Tengah. Saat ini keduanya tengah dilanda konflik yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dan blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar.

Permasalahan diatas tentunya memancing para analis untuk membahas serta menganalisis terkait penyebab terjadinya konflik antara kedua negara, sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, hanya saja dari beberapa penelitian yang telah terekspos di media-media online, belum ada yang menjelaskan bagaimana kebijakan blokade Qatar tersebut dapat ditinjau dari perspektif teori dalam studi hubungan internasional. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan blokade yang

diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar ditinjau dari sudut pandang ilmu hubungan internasional, yaitu melalui perspektif *Decision Making*. Teori ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana suatu kebijakan dapat dibuat dengan mempertimbangkan keadaan yang ada pada *faktor internal* dan internasional.

1.5 Cakupan Penelitian

Adapun pokok bahasan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini antara lain adalah; kebijakan Arab Saudi terkait blokade Qatar dan bagaimana persoalan tersebut ditinjau dari perspektif *Decision Making*. Lebih tepatnya penelitian ini mencakup bahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar pada Juni 2017, dimana krisis Teluk ini dimulai hingga September 2019.

1.6 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai krisis diplomatik di Qatar dapat ditemukan pada artikel-artikel yang dimuat di berbagai macam jurnal internasional. Diantara sekian banyak artikel yang mengkaji tentang krisis diplomatik yang terjadi di Qatar, terdapat satu artikel yang cukup menarik untuk dibahas. Artikel tersebut ditulis oleh James M. Dorsey dengan judul *Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis?* yang menganalisis tentang krisis diplomatik yang terjadi di Qatar dan kaitannya dengan dunia *Sport*

atau olahraga. Dalam artikelnya, James berpendapat bahwa kebijakan blokade yang dibuat oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap Qatar akan berdampak buruk bagi persiapan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2020, tentunya hal tersebut dapat dilihat dari kebutuhan Qatar yang ingin mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menjadi tuan rumah di ajang bergengsi tersebut, diantaranya adalah impor bahan-bahan bangunan untuk membangun 8 stadion yang tentunya memakan biaya lebih mahal dari biasanya disebabkan oleh adanya blokade dari Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya (Dorsey, 2018). Pendapat yang diutarakan oleh Dorsey dalam artikelnya tersebut cukup menarik, namun sayangnya ia hanya melihat krisis diplomatik Qatar berdasarkan pada satu dampak saja, yaitu dampak dalam bidang ekonomi, sedangkan dampak krisis diplomatik pada sektor tersebut tidak seburuk seperti yang digambarkan oleh Dorsey dalam artikelnya, hal tersebut jelas karena Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dan bahkan hingga saat ini persiapan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2022 masih terus berlanjut, dan belum ada informasi bahwa piala dunia akan dialihkan ke negara lain untuk menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi tersebut, itu artinya krisis diplomatik yang terjadi di Qatar tidak begitu berpengaruh bagi persiapan Qatar menjadi tuan rumah pada piala dunia 2022. Pembahasan mengenai dampak krisis diplomatik

terhadap perekonomian Qatar secara lebih lanjut akan dipaparkan penulis dalam penelitian ini.

Sejalan dengan apa yang diutarakan Dorsey, Jehani juga sepakat bahwa kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi Qatar. Dalam artikelnya yang berjudul *The Impact Of The Blockade On Families In Qatar*, ia memaparkan bahwa penerapan blokade oleh Arab Saudi terhadap Qatar telah berdampak pada isu kemanusiaan di negara tersebut. Lebih jauh, artikel tersebut menggambarkan tentang bagaimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk yang memboikot Qatar telah melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya kepada masyarakat Qatar yang berada di Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang terlibat dalam blokade terhadap Qatar. Bagaimana tidak, masyarakat Qatar yang tinggal di Arab Saudi dan negara-negara tersebut diminta untuk meninggalkan negara mereka dan kembali ke Qatar dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu blokade ini juga telah menyebabkan terjadinya perceraian antara pasangan warga negara Arab Saudi dengan warga Qatar. Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena mereka takut akan mendapat hukuman atau sanksi dari negaranya jika mereka masih berhubungan dengan warga Qatar, kedua karena mereka simpati terhadap negara Qatar, dan ketiga, karena mereka percaya terhadap doktrin negara mereka mengenai negara Qatar (Jehani, 2018). Pendapat yang dipaparkan oleh Jehani dalam

artikelnnya diatas sebenarnya cukup bagus dengan menggambarkan terkait bagaimana krisis diplomatik Qatar ini berpengaruh pada kemanusiaan di Qatar, namun alangkah baiknya jika penelitian tersebut juga melihat dari sisi lainnya yaitu terkait dengan bagaimana keadaan masyarakat Arab Saudi itu sendiri, apakah mereka juga merasakan hal yang sama, dalam artian merasa bahwa krisis diplomatik ini memberikan dampak yang buruk bagi mereka atau justru sebaliknya, hal ini seharusnya dilakukan agar tidak ada ketimpangan dalam menilai suatu permasalahan. Pemaparan mengenai dampak krisis diplomatik Qatar terhadap kemanusiaan yang ada di Qatar maupun Arab Saudi akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Agus, seorang dosen Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Sudirman, dalam artikelnnya yang berjudul Blokade Qatar, ia berpendapat bahwa blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar sangat merugikan masyarakat Qatar, terutama dalam bidang akomodasi dan transportasi, dimana blokade tersebut meliputi larangan bagi masyarakat Qatar untuk menggunakan jalur darat, laut, dan udara untuk melakukan perjalanan menuju Arab Saudi, hal ini jelas membuat masyarakat Qatar terhambat dan kesulitan untuk melakukan kegiatan mereka diluar negeri, terutama di Arab Saudi, seperti halnya umroh, haji dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan melalui jalur Qatar (Haryanto, 2017). Tidak jauh berbeda

dari keduanya, Haryanto juga cukup baik dalam memaparkan pendapatnya terkait krisis diplomatik Qatar dan dampaknya bagi aktifitas mobilisasi masyarakat Qatar secara umum, hanya saja ia kurang melihat faktor-faktor internal dari Qatar itu sendiri, bahwa sebenarnya pemerintah Qatar juga telah memperketat peraturan terkait warganya yang ingin menunaikan ibadah haji, mengingat hubungan antar kedua negara yang saat ini sedang tidak baik. Hal tersebut akan menjadi salah satu pokok bahasan yang akan dipaparkan penulis dalam penelitian ini.

Berbeda dengan ketiga pendapat diatas, Alberto Negri dalam artikelnya yang berjudul *Gulf Regional Crisis: Qatar-Saudi Arabia Rivalry, Tensions within the Gulf Cooperation Council* justru menganggap bahwa blokade yang dilakukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan beberapa negara Teluk lainnya telah gagal, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari negara-negara besar terhadap Qatar seperti Turki dan Iran. Tidak hanya itu, hingga saat ini negara-negara Barat sama sekali tidak mengurangi intensitas hubungan mereka dengan Doha, bahkan beberapa negara seperti Italia telah meningkatkan intensitas hubungannya dengan Qatar. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa opini internasional lebih condong memberikan dukungan terhadap Qatar dibandingkan dengan Arab Saudi, mereka menganggap bahwa Qatar jauh lebih rasional dan koheren dalam mempertahankan kebijakannya, sementara Arab Saudi dan UEA tidak lebih hanya sekedar mengekspresikan rasa

takut dan marah mereka, belum lagi ditopang dengan ketidakmampuan mereka dalam membuktikan secara nyata terkait apa yang mereka tuduhkan ke Qatar (Negri, 2018). Pendapat Negri terkait kegagalan Arab Saudi dalam kebijakan blokade yang diterapkannya terhadap Qatar cenderung terburu-buru, ia begitu cepat dalam mengambil kesimpulan dengan mengatakan bahwa tidak masalah bagi Qatar untuk menerima boikot dari Arab Saudi, karena Qatar mendapat bantuan dan dukungan dari banyak negara seperti Turki, Iran, dan beberapa negara di Eropa tanpa meninjau kembali bagaimana keadaan Qatar sebelum negara itu terkena blokade, seharusnya sebelum mengatakan bahwa blokade Arab Saudi terhadap Qatar itu gagal, ia harus terlebih dahulu melihat keefektifan negara Qatar dalam menjalin hubungan dan melakukan kerja sama dengan negara-negara lainnya dari sebelum dan sesudah kebijakan blokade itu diterapkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meninjau kembali terkait efektifitas negara Qatar dalam melakukan kerja sama khususnya di bidang ekonomi sebelum negara tersebut terkena imbas dari blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi.

Adapun pendapat lainnya datang dari Joseph M. Fernandez, dalam artikelnya yang berjudul *The Qatar-Gulf crisis The attack on media freedom and the West's loss of moral authority*, ia memandang bahwa kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar merupakan sebuah ironi, dimana Arab Saudi melakukan blokade

terhadap Qatar dengan alasan bahwa Qatar telah mendukung kelompok-kelompok ekstrim, sedangkan menurut pemeriksaan secara faktual, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa HOS (*House Of Saud*) mengizinkan adanya aliran dana yang ditujukan kepada ISIS, namun Arab Saudi membantah klaim tersebut dengan sangat kuat (Fernandez, 2018). Pendapat yang diutarakan oleh Fernandez dalam artikelnya sebenarnya menarik untuk dibahas, dimana hal tersebut memberikan informasi kepada masyarakat internasional tentang siapa sebenarnya Arab Saudi, namun sama halnya seperti pendapat para analis sebelumnya, pendapat Fernandez ini hanya berlandaskan studi empiris semata dan tidak mendasarkan pendapatnya pada teori tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk melihat permasalahan krisis diplomatik Qatar ini dari sisi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sudut pandang teoritis sebagai alat untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian penelitian diatas, disini penulis akan berupaya untuk membahas krisis diplomatik yang terjadi di Qatar dari sudut pandang yang belum pernah dibahas oleh literatur-literatur yang sudah ada. Aspek yang paling disorot dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi terdorong untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut yang kemudian penulis akan mencoba untuk menganalisisnya menggunakan perspektif *Decision Making*.

1.7 Landasan Konsep/Teori Model

Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis atau peneliti tentunya membutuhkan teori untuk dijadikan landasan bagi penelitiannya. Bagi ilmuwan hubungan internasional, teori digunakan untuk menganalisis problematika yang terjadi di dunia internasional. Banyaknya teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional membuat definisi dari teori tersebut juga beragam. Salah satu definisi teori menurut ilmuwan hubungan internasional adalah sebagai berikut; “Teori adalah observasi untuk menguji hipotesis mengenai dunia” (Burchil dan Linklater, 2009, hal. 11). Adapun teori yang dijadikan penulis sebagai landasan dalam penelitian ini adalah perspektif *Decision Making*.

Decision Making merupakan salah satu teori dalam ilmu hubungan internasional yang berfungsi untuk menganalisis para aktor hubungan internasional dalam membuat sebuah kebijakan. Adapun definisi dari teori ini menurut Coplin adalah sebuah cara untuk mengetahui perilaku negara dalam hubungan internasional. Coplin menambahkan bahwa, dalam membuat sebuah kebijakan seorang aktor harus memperhatikan dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kelompok domestik akan menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka, lalu politisi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari kekuatan dengan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada faktor

eksternal, pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam rangka untuk memenuhi kepentingan domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan pihak asing (Coplin, 2003). Kedua hal ini akan selalu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh aktor negara dan aktor hubungan internasional, tidak satupun diantara keduanya dapat diabaikan oleh pembuat kebijakan selama suatu negara itu masih berada dalam ketergantungan atas negara lain.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis kebijakan Arab Saudi terkait blokade Qatar melalui dua faktor tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal memperhatikan bagaimana keadaan domestik di Arab Saudi yang membuatnya harus mengeluarkan kebijakan tersebut. Pada faktor ini, keadaan domestik Arab Saudi yang dalam hal ini adalah Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor utama yang mendorong negara itu untuk memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar. Sedangkan faktor eksternal memperhatikan bagaimana keadaan di lingkup internasionalnya, lebih tepatnya di kawasan Timur Tengah yang memancing pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pada faktor ini, aktor-aktor internasional di kawasan Timur Tengah merupakan penyebab utama yang mendorong Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, salah satu contoh ringkas adalah hubungan antara Qatar dengan Iran yang notabene merupakan musuh bebuyutan Arab

Saudi, sehingga memaksa Arab Saudi harus melakukan blokade terhadap Qatar disebabkan oleh kedekatannya dengan Iran. Menurut Coplin terdapat empat unsur yang dapat menentukan proses dibuatnya sebuah kebijakan luar negeri. Pertama adalah politik dalam negeri suatu negara, kedua adalah pembuat keputusan itu sendiri, ketiga adalah sektor ekonomi dan militer dan keempat adalah keadaan internasionalnya (Coplin, 2003). Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya berupa blokade terhadap Qatar, dimana dari keempat unsur tersebut, penulis hanya akan menggunakan dua unsur saja, yaitu politik dalam negeri Arab Saudi atau faktor internal (domestik) serta keadaan internasional di kawasan Timur Tengah atau faktor eksternal. Menurut penulis, teori ini adalah teori yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh aktor hubungan internasional, dimana teori ini mempertimbangkan penyebab dibuatnya kebijakan tersebut melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis metode kualitatif. Sebuah metode yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan sosial. Metode kualitatif menurut (Creswell, 2008) adalah suatu

metode pendekatan atau penelusuran untuk memahami dan mengeksplorasi suatu gejala sentral (Raco, 2010, hal. 5).

b. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah negara Arab Saudi, sedangkan objek yang diteliti adalah kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar melalui perspektif *Decision Making*.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan sumber data sekunder sebagai rujukan. Adapun sumber data tersebut berasal dari media tertulis seperti buku, teks akademik, maupun berita-berita online yang kredibel.

d. Proses Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk kemudian dikonsultasikan dengan dosen yang ahli di bidang tersebut.